

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Setelah menghimpun data dan menganalisis implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu) melalui *e-Musrenbang* menggunakan analisis teori implementasi yang dikemukakan oleh Edward III peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa implementasi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu *melalui e-Musrenbang* dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta sebagai operator pelaksana, dengan dipengaruhi konsep *e-Government* pemerintah membuat inovasi dengan penerapan *e-Musrenbang*.

e-Musrenbang adalah laman yang dibuat untuk mendigitalisasi proses musrenbang konvensional yang sebelumnya berjalan melalui tatap muka langsung para *stakeholder*, saat ini terdapat dua fitur yang ada dalam *e-Musrenbang* DKI Jakarta yaitu Rembuk RW dan usulan langsung, seperti yang dijelaskan sebelumnya Rembuk RW adalah digitalisasi rekam jejak dokumen hasil dari Rembuk RW konvensional sehingga usulan dapat dipantau dan diketahui keputusan penerimaan atau penolakannya. Terdapat fitur kedua yaitu usulan langsung di mana usulan tersebut sebagai fasilitas untuk seluruh warga DKI Jakarta yang tidak berkesempatan mengikuti Rembuk RW atau memiliki usulan pribadi yang menyangkut pembangunan daerah untuk berpartisipasi. Proses penerimaan usulan langsung tidak melalui alur hierarkis seperti musrenbang konvensional melainkan

melalui mekanisme *cut off* sehingga usulan yang dihimpun langsung masuk ke pusat data dan informasi Bappeda untuk diseleksi sesuai kriteria dan direalisasikan.

Adapun secara teori implementasi Edward III dapat dijelaskan sesuai 4 unsur yaitu:

1. Komunikasi

Komunikasi yang dilakukan berupa publikasi kepada masyarakat mengenai *e-Musrenbang* meliputi waktu pelaksanaan, alur, dan hal-hal yang harus diperhatikan. Pengemasan publikasi melalui media sosial, pengumuman, serta melibatkan lembaga pers untuk meneruskan berita.

2. Sumber daya

Sumber daya yang dimiliki dan terlibat dalam implementasi program ini adalah sumber daya profesional terlatih, secara internal Bappeda memiliki pegawai-pegawai terlatih berlatar belakang pendidikan dan pengalaman di bidangnya serta siap melakukan pembinaan kepada *stakeholder* sampai tingkat Rukun RW. Meskipun ditemukan kendala seperti kurangnya pengetahuan teknologi di kalangan Ketua RW namun *stakeholder* di atasnya seperti lurah, camat, dan petugas Bappeda siap melakukan *backup* guna menyelesaikan masalah yang ada.

3. Disposisi

Bappeda sebagai lembaga perencanaan memegang fungsi disposisi yang sentral terhadap lembaga-lembaga terkait untuk urusan Musrenbang mayoritas aspirasi masyarakat adalah di bidang pembangunan fisik, pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan maka dari itu Bappeda siap meneruskan usulan

tersebut kepada lembaga-lembaga terkait seperti Dinas Cipta Karya, Dinas Sumber daya Air, Dinas Pertamanan, Dinas Lingkungan Hidup. dll

4. Birokrasi

Birokrasi pada *e-Musrenbang* tetap berjalan sesuai alurnya hanya saja berbasis data digital, pada pelaksanaannya tetap menghimpun usulan melalui Rembuk RW, diteruskan ke musrenbang kelurahan, musrenbang kecamatan, musrenbang kabupaten/kota administratif, hingga musrenbang provinsi. Selain itu pemerintah juga bekerja sama dengan DPRD sebagai pemegang fungsi anggaran dalam pembangunan serta berkoordinasi juga mengenai aspirasi yang masuk melalui DPRD.

Faktor yang membuat *e-Musrenbang* DKI Jakarta dapat dikatakan berhasil adalah kesiapan dan keseriusan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Bappeda Provinsi DKI Jakarta dalam mengimplementasikan Perda DKI Jakarta No.14 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Dan Penganggaran Terpadu Melalui E-Musrenbang sehingga dapat dijadikan bagi daerah lain.

Kesimpulan yang diambil implemetasi *e-Musrenbang* di DKI Jakarta terbilang berhasil. Hal tersebut dibuktikan dengan sudah tercapainya indikator-indikator keberhasilan yang ditetapkan. DKI Jakarta memperoleh dua penghargaan sekaligus pada 2017. Penghargaan itu dinamakan Anugerah Pangripta Nusantara 2017. DKI Jakarta dinobatkan sebagai Provinsi dengan Inovasi Terbaik dalam Perencanaan. Selain itu, DKI Jakarta meraih peringkat II Provinsi dengan Perencanaan Terbaik.

4.2 Saran

Saran dari penulis untuk perencanaan pembangunan DKI Jakarta diharapkan dapat mempertahankan capaian positif yang telah diraih serta terus meningkatkannya agar menjadi lebih baik, unsur sosial masyarakat agar lebih diperhatikan dibanding hanya fokus terhadap pembangunan fisik dikarenakan masalah yang timbul di ibu kota juga berkaitan dengan sosial kemasyarakatan bukan hanya soal pembangunan fisik. Faktor eksternal seperti isu politik di tengah keberjalanan pembangunan diharapkan tidak menjadi penghambat sebuah pelaksanaan pembangunan dikarenakan pembangunan yang dilakukan di daerah sudah memiliki dasar aturan yang jelas sehingga harus dijalankan dengan profesional agar dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat.